

Namun kemerdekaan ternyata tidak membawa Sudan pada kesatuan negara yang lebih utuh. Pasukan pemberontak dari *Equatoria Corps*/ gerakan yang biasa disebut *The Torit Mutiny*, ternyata bukanlah gerakan pemberontakan yang berlangsung selama berminggu-minggu saja. Memang benar bahwa gerakan pemberontakan di tahun 1955 tersebut berskala kecil, dan tidak membawa dampak/ perubahan yang signifikan di Sudan, namun gerakan tersebut telah memberikan inspirasi bagi warga negara Sudan di bagian Selatan untuk ikut serta dalam gerakan pemberontakan tersebut. *The Torit Mutiny* telah memberikan refleksi bahwa mayoritas Sudan Selatan tidak menyetujui sistem pemerintahan yang diaplikasikan saat itu. Berusaha memperlihatkan kepada bukan hanya Sudan Utara, tetapi kepada seluruh dunia bahwa mereka tidak ingin terjadi kesatuan politik antara Sudan Selatan dan Sudan utara, bahkan sejak kemerdekaan.⁵¹

Nampaknya gerakan pemberontakan *The Torit Mutiny* ini telah membangkitkan kesadaran warga negara Sudan di Selatan bahwa mereka tidak diberikan hak yang sama dalam pemerintahan Sudan secara keseluruhan. Sehingga pemberontakan pertama ini telah dengan sukses memunculkan gerakan-gerakan pemberontakan lainnya di daerah Selatan. Gerakan pemberontakan telah membesar membentuk kelompok pemberontak yang terdiri atas gerakan pemberontakan pertama di Torit, serta pelajar dari Sudan Selatan yang juga ingin berpartisipasi dalam pemberontakan tersebut. Kelompok ini-pun membentuk pasukan gerilya *Anya Nya*. Dari hal tersebut, gerakan pemberontakan *The Torit*

⁵¹*Focus On South: Jaafar Nimeiri, the Untrustworthy President.*

Mutiny menjadi sumber perang sipil pertama di Sudan, atau yang biasa disebut sebagai perang Anyanya pertama.⁵²

Arti nama Anya Nya adalah Ular berbisa. Anya Nya merupakan sebutan dari para pemberontak yang berusaha melawan pemerintahan pusat (yang dikuasai Sudan Utara saat itu). Berbeda dengan *The Torit Mutiny*, Anya Nya ini melakukan operasi pemberontakan dalam skala yang lebih besar, terdiri dari berbagai etnis dari Sudan Selatan, serta persenjataan yang lebih mendukung. Pada saat gerakan pemberontakan di Torit tahun 1955, persenjataan sangat terbatas. Mayoritas dicuri dari departemen kepolisian Sudan, ditambah operasi yang biasa hanya dilakukan di daerah hutan dan tempat-tempat yang tersembunyi. Sehingga gerakan pemberontakan oleh Anya Nya ini jauh lebih kuat apabila dibandingkan dengan sebelumnya.

Pasukan persenjataan Anya Nya banyak dibantu oleh konflik yang terjadi di luar Sudan. Pada tahun 1965, negara-negara Arab, serta Afrika menunjukkan dukungannya terhadap gerakan *Simba* di Kongo. Persenjataannya pun dikirim lewat jalur daratan. Namun persenjataan yang diharapkan jatuh ke tangan gerakan *Simba*, malah jatuh ke tangan pasukan pemberontakan Anya Nya. Gerakan pemberontakan ini telah berlangsung selama beberapa tahun, yakni dari tahun 1963-1969.⁵³

Begitu banyak pergerakan pemberontakan yang berlangsung saat itu, menentang pemerintahan yang didominasi oleh Sudan Utara, sehingga beragam

⁵²South Sudan celebrates the first rebellion, the Torit Mutiny. www.sudantribune.com/South-Sudan-celebrates-Torit_28325. Diakses pada 12 Februari 2012.

⁵³D. J. M. M. The Role of the Sudanese Government in the Sudanese Civil War. *Kompa*: The international African

kelompok gerakan pemberontakan tersebut tidak mewakili satu suara. Sehingga upaya negosiasi yang dilakukan selalu gagal, sebab adanya perbedaan pendapat, ataupun latar belakang etnis yang menghambat prosesi negosiasi. Sehingga di pada Januari 1971, mantan letnan tentara Sudan, Joseph Lagu mengumpulakn dan menyatukan semua kelompok gerakan pemberontakan kedalam sebuah gerakan yang disebut SSLM (Southern Sudan Liberation Movement) atau disebut Gerakan pembebasan Sudan Selatan. Ini adalah pertama kalinya struktur komando terstruktur untuk pencapaian tujuan yang sama. Alhasil gerakan ini melakukan berbagai macam negosiasi dengan pihak pemerintahan pusat untuk mencapai sebuah perjanjian yang dapat disepakati bersama.

Pembentukan SSLM ini memberikan kekuatan yang baru bagi gerakan pemberontakan. Tersedianya pasukan persenjataan, dan perluasan operasi yang dilaksanakan telah merefleksikan kekuatan militer yang patut diperhitungkan. Dengan adanya struktur komando yang lebih jelas, strategi, serta gerakan yang dilakukan para pemberontak semua terstruktur, dan semakin menekan pemerintahan pusat untuk mengapresiasi suara dari Sudan Selatan. Pada akhirnya, SSLM diakui sebagai organisasi yang masuk dalam aktor negosiasi, menunjukkan bahwa SSLM telah memberikan kemajuan dalam pergerakan pemberontakan yang telah berlangsung sejak tahun 1955.

Tertekan oleh gerakan pemberontakan yang terjadi di daerah Sudan Selatan, maka di tahun 1972, dibuatlah perjanjian antara pemerintahan pusat dan SSLM (*Southern Sudanese Liberal Movement*). Perjanjian ini disebut sebagai *The 1972*

1972 Addis Ababa Agreement, ditandatangani oleh presiden Sudan saat itu (*President*

Jafaar Muhammad An-Numeiry) dan Joseph Lagu dari Anya Nya, yang pada akhirnya membawa akhir dari perang sipil pertama di Sudan (1955-1972).⁵⁴

Perjanjian Addis Ababa bertujuan untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama 17 tahun. Saat perang sipil yang terjadi saat itu menelan begitu banyak korban, serta menghabiskan sumber daya Sudan Utara yang tergolong banyak, saat itulah pemerintahan pusat ingin melakukan negosiasi dengan pihak gerakan pemberontakan. Sebagai *bargaining power*, perjanjian ini memberikan Sudan Selatan otonomi daerah, yaitu otoritas untuk menjalankan pemerintahan di daerah tersebut.

Perdamaian terjadi selama beberapa tahun. Namun perjanjian Addis Ababa ternyata merupakan solusi jangka pendek dari konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Integrasi yang dipaksakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Banyak permasalahan yang muncul setelah perjanjian Addis Ababa ini. Integrasi unit militer nasional yang diusulkan menghasilkan banyak curigaan dan ketidakmampuan untuk saling percaya antara pasukan bersenjata Sudan Selatan dan Utara. Perkembangan ekonomi yang tidak setara juga mewarnai kegagalan integrasi negara Sudan.

Dalam perjanjian Addis Ababa, pasukan militer menjadi topik pembahasan utama, sebab berhubungan dengan keamanan negara. Pihak pemberontak dari SSLM menginginkan adanya 3 macam militer Sudan. Tentara Sudan Utara, Sudan Selatan, serta tentara nasional (yang terdiri dari pasukan kedua pihak). Hal ini diusulkan demi tetap menjaga keamanan dari Sudan Selatan, dari kemungkinan

⁵⁴ 1972 Addis Ababa Agreement (for the Sudan).

serangan dari Sudan utara. Karena tidak disepakati, maka diterapkanlah integrasi militer, dimana di kedua wilayah (Sudan Utara dan Sudan Selatan), akan terdiri dari jumlah pasukan yang seimbang jumlahnya, antara pasukan Sudan Utara dan Selatan.

Beberapa pasukan gerilya tidak menyetujui prasyarat tersebut. Sehingga kembali mengasingkan diri di daerah kehutanan Sudan Selatan. Pasukan Sudan Selatan yang setuju tetap memiliki perasaan curiga, serta ketakutan yang besar. Kemungkinan ditugaskan ke Sudan Utara bisa berakibat fatal bagi keselamatan mereka. Sehingga beberapa pasukan lebih memilih jadi bagian unit pasukan pada saat perang sipil pertama Sudan. Pemikiran yang muncul tidak hanya itu, juga adanya rasa benci yang tetap membara dalam jiwa setiap pasukan gerilya tersebut. Semua permasalahan integrasi diatas sangat fatal dalam bidang militer, sebab konsentrasi tingkat tinggi akan selalu dibutuhkan, tanpa ada hambatan seperti ketidakpercayaan, atau bahkan rasa benci antar sesama pasukan dalam unit militer.

Dalam perjanjian Addis Ababa, proses integrasi militer ini berlangsung selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, integrasi militer tidak juga ditemukan. Bisa dilihat bagaimana masih banyak mantan pemberontak yang tidak diterima ataupun tidak mau menjadi bagian dari pasukan militer nasional, sehingga mengasingkan diri ke tempat yang tersembunyi. Kenyataan bahwa beberapa petinggi-petinggi pasukan gerilya mendapat jabatan yang rendah dalam pasukan militer nasional yang baru saja terbentuk juga telah mengurangi insentif para gerilya tersebut

Addis Ababa dari segi integrasi militer telah gagal, karena tidak memperhatikan unsure kebencian dan rasa curiga antar Sudan Selatan dan Utara yang telah berada dalam konflik internal selama 17 tahun.

Namun masalah yang juga muncul dalam perjanjian Addis Ababa adalah dari segi perkembangan Sudan Selatan pasca perjanjian. Dalam perjanjian, Sudan Selatan berhak atas otonomi daerah Sudan Selatan, yang berarti Sudan Selatan waktu itu memiliki hak untuk mengembangkan perekonomiannya dengan sendiri, serta mendapatkan bantuan perkembangan berupa insentif finansial kepada Sudan Selatan. Tak satupun yang terealisasi.

Proyek perkembangan ekonomi yang telah dijanjikan oleh Sudan Utara gagal diaplikasikan pasca perjanjian Addis Ababa. Bahkan selama 11 tahun otonomi daerah tersebut, Sudan Selatan telah diabaikan oleh Sudan Utara untuk pemberian kesempatan perkembangan ekonomi yang setara dengan utara. Memang perkembangan ekonomi Sudan Selatan selama pasca perjanjian ditandatangani ada, namun tidak signifikan untuk proliferasi ekonomi domestic Sudan Selatan itu sendiri. Otonomi dalam bidang pendidikan, perkembangan regional, serta ekonomi telah membangkitkan amarah warga Sudan Selatan yang merasa ketidakadilan tetap terjadi.

Sistem otonomi daerah Sudan Selatan yang dijanjikan dalam perjanjian Addis Ababa ternyata berbeda dengan yang diharapkan oleh SSLM (*Southern Sudan Liberal Movement*). Yang diharapkan oleh pihak pemberontak adalah sistem federalisme sebagai bentuk negara Sudan, dimana nantinya pemerintahan

menentukan beberapa kebijakan khusus Sudan Selatan. Hal ini untuk mengatasi beberapa kebijakan Sudan Utara yang tidak sepadan dengan Sudan selatan. Namun seiring dengan waktu, pemerintah pusat banyak melakukan intervensi pada sistem pemerintahan dan pembuatan kebijakan Sudan Selatan. Tidak memberikan bantuan perkembangan yang telah dijanjikan. Serta tidak diberikan otonomi dalam berbagai bidang esensial dalam negara.

Berbicara mengenai intervensi pemerintahan pusat terhadap Sudan Selatan, tentunya tidak lepas dari sistem politik dalam Sudan Selatan itu sendiri. Perjanjian Addis Ababa membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Eksekutif Sudan Selatan, yang menjalankan sistem pemerintahan dalam otonomi daerah Sudan Selatan. Dalam pemilihan Ketua Dewan Eksekutif tersebut, seringkali terjadi intervensi dari pemerintahan pusat. Walaupun banyak menghadapi hambatan dalam pembentukan negara Sudan yang baru, setidaknya perjanjian Addis Ababa ini telah menghentikan perang sipil berskala besar, yang berlangsung 17 tahun. Perjanjian Addis Ababa pada saat itu dimaksudkan memberikan harapan kepada rakyat Sudan Selatan akan perdamaian, serta perkembangan sosio-ekonomi daerah. Namun karena banyaknya pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pemerintahan pusat di Sudan Utara, meningkatkan minat warga Sudan Selatan untuk ikut serta sebagai pasukan gerilya menentang pemerintahan pusat.

Permasalahan integrasi militer kedua pihak yang gagal ikut masuk sebagai kegagalan dari perjanjian Addis Ababa. Sejak 1980an, jumlah tentara asal Sudan Utara yang berada di Sudan Selatan mulai meningkat, melebihi jumlah pasukan Sudan Selatan. Bertambahnya pasukan oleh pasukan militer Sudan Utara

terhadap rakyat Sudan Selatan, serta bertambahnya pembunuhan, telah memperkuat refleksi bahwa integrasi antar kedua pihak tidak mungkin diaplikasikan saat ini, dan keharmonisan belum bisa terjadi pula.

Adanya ketidakpercayaan yang terus-menerus lanjut terhadap pemerintahan pusat sejak pengaplikasian perjanjian Addis Ababa, Integrasi militer Sudan Utara dan Selatan yang dipaksakan, ketidaksetaraan pengalokasian sumber daya yang dialokasikan pemerintahan pusat ke Sudan Selatan, serta kebijakan radikal Islamisasi yang dilakukan dalam pemerintahan Jafaar Numeiri, jelas merefleksikan bahwa minat warga di Sudan Selatan untuk melanjutkan pemberontakan yang dihentikan tahun 1972 mulai kembali.

Petinggi-petinggi Anya Nya, serta kelompok gerakan pemberontak yang ada di Sudan Selatan banyak telah tersebar ke berbagai daerah di Sudan. Yang meyakini perjanjian Addis Ababa kebanyakan masuk dalam pasukan militer nasional Sudan, dan selama beberapa tahun sejak perjanjian diterapkan, memastikan agar perjanjian tidak diingkari dan terus berjalan.

Namun beberapa kelompok yang merasa perjanjian Addis Ababa tidak memberikan jawaban atas aspirasi negara federal, serta otonomi terhadap Sudan Selatan, ternyata bersembunyi di semak-semak di daerah Sudan Selatan, bahkan sampai ke negara tetangga, Ethiopia. Salah satunya adalah Anya Nya-2. Anya Nya-2 sebelum 1980an tidak memperlihatkan eksistensinya dalam pergerakan pemberontakan, namun setelah itu mulai bergerak. Berbeda dengan Anya Nya

telah kebanyakan berada di posisi netral, dalam artian melindungi stabilitas negara, tanpa melihat adanya pihak-pihak tertentu yang mengelompokkan.

Kemungkinan perang sipil semakin menguat. Yang menjadi permasalahan bagi pihak gerilya adalah jumlah. Dimana kebanyakan pasukan Sudan Selatan saat itu melindungi perjanjian Addis Ababa. Sejak 1982, pihak pemberontak mulai melakukan komunikasi dengan pasukan Sudan Selatan tersebut. Dimana penjelasan komprehensif akan ketidakadilan pemerintahan pusat harus dihentikan. Pada tahun yang sama, 2,500 pasukan yang dahulunya netral, kembali menjadi anggota kelompok pemberontakan yang baru. Bahkan beberapa pasukan militer mulai mengunjungi markas-markas Anya Nya-2, serta kelompok pasukan gerilya lainnya di Sudan Selatan.

Dengan kasus yang sama pada perang sipil pertama Sudan di tahun 1955, pada tahun 1983, pasukan gerilya tersebut memutuskan untuk berada dalam sebuah komando yang mampu mengintegrasikan kelompok pasukan gerilya, serta kelompok pemberontak secara keseluruhan. Terbentuk-lah SPLA/M (Southern People's Liberation Army/Movement), yang berada dalam komando John Garang. Ideologi yang muncul adalah, mereka dipersatukan atas kegagalan perjanjian Addis Ababa.

Demi mendapat jumlah pasukan yang mereka inginkan untuk pelancaran serangan, SPLA/M membentuk sebuah strategi dengan cara membuat daftar 'keluhan', yang terdiri dari kegagalan pemerintahan pusat, serta perjanjian Addis Ababa dalam menyikapi berbagai permasalahan. Dari keluhan tersebut, SPLA/M

bahwa mereka bisa dipersatukan dalam sebuah komando, berdasarkan kesamaan kepentingan dalam menyikapi berbagai keluhan. Mengingat bahwa jumlah etnis yang kemungkinan akan bergabung, sangat beragam.

Beberapa keluhan yang didaftarkan adalah; intervensi pemerintah pusat pada pemilihan ketua Dewan Eksekutif, kegagalan otonomi daerah, ketidakjelasan dalam pembagian perbatasan wilayah Sudan Selatan dan Utara, pengabaian terhadap perkembangan sosio-ekonomi di Sudan Selatan, integrasi militer, mantan pasukan Anya Nya yang tidak sepenuhnya terintegrasi dalam pasukan militer saat itu, serta rencana memindahkan pasukan Any Nya ke daerah Sudan utara.⁵⁵

Pemerintahan Jafaar Numeiri telah memperbesar keinginan warga Sudan Selatan untuk melakukan pemberontakan melalui SPLA/M, dengan kebijakan Syariah Islam yang diterapkan saat itu. Kebijakan tersebut tidak hanya mendapat penolakan dari mayoritas Kristen di Sudan Selatan, tetapi juga antar sesama Muslim di Sudan Utara. Namun popularitas Numeiri tidak hanya jatuh disebabkan oleh Islamisasi tersebut. Masa pemerintahan Numeiri merefleksikan masa kejatuhan ekonomi paling mengkhawatirkan di Sudan. Hingga akhirnya Jafaar Numeiri di kudeta tahun 1985.⁵⁶

Pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 1986, menghasilkan Sadiq Al-Mahdi sebagai Perdana Menteri. Selama pemerintahan Sudan, banyak gerakan

⁵⁵ Douglas HJohnson, *The Root Causes of Sudan's Civil War*, Kampala: The international African institute. 2003. Hal.75.

⁵⁶*Sudan timeline*. <http://www.humanrightsfirst.org/our-work/crimes-against-humanity/sudan-timeline/>. Diunduh pada 12 Februari 2012.

⁵⁶*Sudan-Africa Timeline of conflict*.

<http://www.learn2question.com/seevak/groups/2006/sites/Power/SP%28Africa%29/Sudan/Time>

militia/ bersenjata, yang berdasarkan pada kelompok-kelompok etnis dari Sudan Barat (Darfur). Kelompok-kelompok radikal tersebut dahulunya tidak membawa dampak yang besar terhadap stabilitas negara, namun sejak pemerintahan Sadiq, dukungan yang perangkat persenjataan yang diberikan telah meningkatkan gerakan kelompok-kelompok radikal tersebut, yang biasa beroperasi di daerah Sudan Selatan, yang merupakan sumber dari SPLA/M.

The Misiriyya & Rizaiyat Baqqara Murahalin merupakan satu dari beberapa kelompok radikal yang berpengaruh saat itu. Murahalin biasa beroperasi di Sudan Selatan, melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan dan penculikan. Perdagangan perbudakan saat itu kembali muncul. Wanita dan anak-anak diculik, lalu dijual di Sudan Utara untuk menjadi budak. Adanya insentif untuk ikut serta dalam kelompok radikal tersebut, sebab masalah finansial yang melanda. Konflik yang terjadi telah mempengaruhi kestabilan ekonomi Sudan secara keseluruhan, membawa kemiskinan serta deprivasi makanan di seluruh wilayah Sudan. Perdana Menteri Sadiq menunjukkan dukungan terhadap gerakan tersebut, sebab dalam operasinya, kelompok seperti Murahalin secara langsung beradu dengan SPLA/M. keadaan tersebut telah melemahkan sistem pertahanan dari SPLA/M secara signifikan.

Kenyataan bahwa adanya kelompok yang melemahkan SPLA/M, serta adanya bantuan perangkat militer dari pihak luar tidak mengurangi insentif Sadiq untuk melakukan negosiasi, serta perjanjian perdamaian dengan pihak SPLA/M.

sekaligus ketua SPLA/M, John Garang.⁵⁷ Sampai kepada 2 tahun negosiasi, menghasilkan beberapa prasyarat gencatan senjata. Diantaranya adalah penghapusan hukum Syariah, menghilangkan aliansi militer dengan Libya, serta Mesir, dan mengadakan konferensi pembentukan konstitusi dasar. Sadiq telah menyetujui prasyarat yang disampaikan oleh pihak SPLA/M, dan diharapkan akan diaplikasikan pada bulan September 1989.

Negosiasi yang dilakukan oleh Sadiq ternyata menghilangkan banyak dukungannya, termasuk dari pihak militer Sudan. Komandan Omar Al-Bashiir salah satunya menentang keputusan Sadiq untuk melakukan negosiasi dengan Sudan Selatan. Pihak militer merasa bahwa negosiasi dengan SPLA/M itu tidak menjadi permasalahan, yang menjadi permasalahan adalah apabila ada prasyarat yang diajukan. Disintegrasi antara pemerintahan dan militer menyebabkan kudeta militer pada Juni 1989, yang menjatuhkan Sadiq dari posisi perdana menteri. Sejak saat itu, Omar Al-bashiir menduduki posisi tertinggi negara.⁵⁸

Masa kepemimpinan Omar Al-Bashiir tergolong keras. Omar dalam menghadapi masalah gerakan pemberontakan SPLA/M, tidak ingin melakukan rekonsiliasi dengan pihak pemberontak tersebut. SPLA/M dihadapkan dengan kekuatan militer yang terus menerus melakukan razia di berbagai daerah Sudan

⁵⁷ Sudan second civil war. www.globalsecurity.org/military/world/war/Sudan-civil-war2.htm. Diunduh pada 12 Februari 2012.

⁵⁸ "Sudan's Civil War". www.globalsecurity.org/military/world/war/Sudan-civil-war.htm. Diunduh

Selatan. Sejak tahun 1989 sampai 1990, 2000 wanita dan anak-anak diculik saat razia dilakukan, demi kepentingan bisnis perbudakan di Sudan Utara.⁵⁹

Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) atau biasa disebut *Naivasha Agreement* merupakan hasil dari 3 tahun negosiasi perdamaian antar kedua pihak, yang difasilitasi oleh IGAD. Perjanjian tersebut berisi beberapa hal seperti tindak lanjut dari pasukan militer setiap kubu, otonomi daerah, kekayaan minyak, isu ekonomi, administrasi, serta Hukum Islam. 6 tahun setelah pengaplikasian perjanjian tersebut, akan diputuskan kelanjutan negara Sudan Selatan melalui sebuah referendum. Rakyat Sudan akan diberikan pilihan setelah 6 tahun integrasi pemerintahan kedua pihak (yaitu Januari 2011), apakah rakyat Sudan Selatan menginginkan persatuan, atau kemerdekaan.

Dalam perjanjian *Naivasha*, pasukan militer dari Sudan Selatan dan utara tetap menjadi unit militer yang terpisah satu sama lain. Langkah pertama adalah penarikan 91.000 pasukan pemerintahan dari Sudan Selatan selama 2 setengah tahun, sedangkan pihak SPLA punya waktu 8 bulan untuk menarik pasukannya dari wilayah Sudan Utara. Direncanakan akan ada integrasi militer antar kedua pihak, dengan jumlah tertentu (jadi pasukan militer masing-masing pihak tidak secara langsung diintegrasikan selama 6 tahun periode integrasi pemerintahan). Walaupun akan diintegrasikan, masing-masing unit militer akan berada dalam komando yang berbeda, hanya berada dalam markas yang sama. Hasil referendum

⁵⁹*Sudan-Africa Timeline of conflict.*

<http://www.learn2question.com/seevak/groups/2006/sites/Power/SP%28Africa%29/Sudan/Time>

6 tahun berikutnya, jika menghasilkan persatuan, maka integrasi militer akan dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak.⁶⁰

Dalam perjanjian 2005, masing-masing pihak tidak diberikan obligasi untuk menghilangkan pasukan militernya. Walaupun telah menyetujui gencatan senjata, namun tetap masih ada rasa saling ketidakpercayaan antar kedua pihak. Hak untuk tetap memiliki unit militer dianggap sebagai sebuah mekanisme *check and balance*. Selama 6 tahun setelah diberlakukannya perjanjian CPA, ada kemungkinan salah satu pihak akan melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Suatu saat jika perang kembali pecah, setiap pihaknya mampu untuk melindungi diri mereka masing-masing.⁶¹

Otonomi dalam perjanjian *Naivasha* diberikan kepada Sudan Selatan. Otonomi ini bersifat sementara, sebab masyarakat Sudan Selatan akan dengan sendirinya memilih, apakah mereka menginginkan otonomi daerah (tetap sebagai satu negara Sudan), atau mereka ingin merdeka dari Sudan itu sendiri, membentuk Republik Sudan Selatan. Selama 6 tahun tersebut, penghasilan dari industri minyak yang ada di wilayah Sudan Selatan, akan dibagi dua.

Permasalahan yang paling utama dalam mendapatkan kesepakatan bersama selain masalah pasukan bersenjata masing-masing pihak adalah masalah administratif, serta penerapan hukum di Sudan selama 6 tahun tersebut. Disepakati bahwa sistem administratif akan dibelah menjadi 70:30 (mayoritas pemerintahan selama pemerintahan transisi). Kepala negara akan diduduki oleh

⁶⁰*Sudan Comprehensive Peace Agreement (CPA)*, 9 January 2005.
www.iss.co.za/af/profiles/Sudan/darfur/cpaprov.htm. Diakses tanggal 13 Februari 2012.

⁶¹*Historic Sudan peace Accord signed*. <http://articles.cnn.com/2005-01->

Omar Al-Bashiir, dengan John Garang sebagai wakil dari kepala negara Sudan. Hukum Syariah akan tetap diterapkan di Sudan utara. Perombakan konstitusi akan dilakukan, untuk memastikan bahwa semua warga non-muslim tidak akan terikat pada Hukum Syariah yang bertolak belakang dengan kepercayaan mereka.

Sejak saat itu, perjanjian *Naivasha* diterapkan. Selama enam tahun integrasi pemerintahan SPLA/M dengan pemerintahan pusat, beberapa konflik hamper pecah. SPLA/M mengundurkan diri dari perjanjian tersebut, sebab salah satu syarat tidak dipenuhi oleh pemerintahan pusat. Sampai kepada tahun 2007, Sudan Selatan tetap tidak mengundurkan pasukan Sudan Utara dari Selatan. Walaupun sempat memanas beberapa bulan, akhirnya redam setelah pasukan Sudan Utara di Selatan ditarik kembali pada tahun 2008.

Walaupun tidak sempurna, *Comprehensive Peace Agreement/Naivasha* telah berhasil mengakhiri perang yang berlangsung selama 21 tahun, mengambil 2 juta nyawa rakyat (mayoritas kematian diakibatkan oleh kelaparan).⁶² Dibandingkan dengan perang sipil pertama, ada beberapa hal yang menjadi penyebab perang sipil kedua Sudan berlangsung lebih lama, juga menelan lebih banyak korban dibandingkan perang sipil pertama.

Posisi pemerintahan Numeiri, Sadiq, dan Omar Al-Bashiir yang tidak memiliki keinginan apapun untuk menghapuskan, atau setidaknya melimitasi penerapan hukum Syariah, membuat para pemberontak memiliki alasan untuk tetap melakukan pemberontakan sampai hukum tersebut dihapuskan. Adanya dukungan oleh masyarakat local akan gerakan yang dilakukan SPLA/M serta

⁶²*Historic Sudan peace Accord signed.* <http://articles.cnn.com/2005-01-11/sudan.1>

kelompok pemberontakan lainnya juga ikut serta berkontribusi terhadap perpanjangan peperangan yang terjadi. Hal tersebut telah meningkatkan jumlah pasukan SPLA/M, serta akses ke berbagai daerah sebagai markas, maupun tempat peperangan yang baru.

Pada saat terjadi perpecahan internal dalam kubu SPLA/M, ikut serta berkontribusi terhadap perpanjangan konflik. Bagaimana pemerintahan Omar Al-Bashiir pandai melihat situasi, dan memberikan bantuan fasilitas kepada individu-individu yang ingin menggantikan posisi John Garang sebagai pemimpin SPLA/M. Salah satu alasan mengapa sebuah konflik terus menerus berlanjut, adalah karena adanya sumber daya yang cukup untuk melanjutkannya. Pemerintahan Sudan menemukan sebuah sumber pemasukan baru, yaitu minyak yang ditemukan tahun 1999. Bertambahnya pemasukan buat negara, mayoritas dialokasikan demi kepentingan perang sipil yang terjadi saat itu (pembelian peralatan perang, perangkat persenjataan). Sumber pemasukan, dan pasukan perangkat militer yang baru dan tidak terbatas menyebabkan terjadinya pemikiran bahwa pemerintahan pusat tidak mungkin kalah dengan sumber daya tidak terbatas tersebut. Demi gengsi, perang sipil tersebut dilanjutkan. Namun pada akhirnya dikarenakan keadaan yang semakin tidak menentu mendorong pemerintah melakukan rekonsiliasi melalui beberapa kesepakatan dengan pemberontak, perjanjian yang sangat menentukan posisi sudan Selatan yaitu perjanjian Naivasha.

Perjanjian Naivasha telah menghentikan peperangan sipil yang terjadi sejak

oleh masyarakat Sudan Selatan adalah kepercayaan, apakah melalui integrasi yang disyaratkan dalam perjanjian Naivasha benar-benar dapat terjadi. Kepercayaan antar sesama rakyat Sudan merupakan suatu hal yang esensial dalam pembuatan perdamaian antar kedua pihak, mengingat bahwa perang yang berlangsung tidak singkat, dan usaha integrasi yang dilakukan sebelumnya selalu gagal. Akhirnya rakyat Sudan Selatan diberikan kesempatan untuk menentukan bagaimana nasib mereka di masa depan, melalui referendum. Apakah persatuan akan dicoba sekali lagi, atau mereka inginkan kemerdekaan dari Sudan itu sendiri.

2. Tuntutan Eksternal

Tuntutan eksternal terhadap dilakukannya referendum Sudan bukan hanya dilakukan dengan menggunakan Diplomasi namun banyak dari berbagai negara yang menuntut terjadinya referendum menggunakan cara tersembunyi dengan membiayai kebutuhan persenjataan para kaum sparatis, salah satunya adalah Israel. Israel memainkan peranan penting dalam memperkeruh perang sipil dan memecah belah Sudan. Israel sangat khawatir Sudan dapat menjelma menjadi salah satu negara pro Arab terutama Mesir dalam membela Palestina memerangi Israel.⁶³ Israel-lah yang membiayai para pemberontak di Sudan bagian selatan. Pernyataan ini bukan isapan jempol semata, mantan anggota Mossad, Brigjen Moshe Fergie menuliskan dalam bukunya, *Israel and the Movement for the Liberation of South Sudan*, terbit 2003, bahwa dukungan Israel terhadap para pemberontak Sudan Selatan dilakukan melalui lima fase: tahun 1950an, melalui

⁶³Why Only Darfur? http://www.alternativeinsight.com/Why_Only_Darfur.html Diunduh pada 15

bantuan kemanusiaan; di awal tahun 1960an, dengan melatih anggota-anggota “Popular Army” dibarisan depan Ethiopian; pertengahan 1960an-1970an, dengan mengirimkan berbagai senjata ke Selatan; di akhir 1970an-1980an, dengan mendukung pemimpin pemberontak John Garang; diakhir 1990an, dengan menyediakan Selatan dengan senjata berat melalui Kenya dan Ethiopia.⁶⁴

Selain sumber diatas, pernyataan serupa juga diketemukan dari sumber lainya sebagai berikut:

Selanjutnya pada tahun itu, Joseph Lagu, Komandan Ekuatoria muda Anya-Nya membentuk kelompok perpecahanya sendiri – yakni Southern Sudanese Liberation Movement (SSLM) – dan mulai memperoleh profil, mengeruk keuntungan dari suplai senjata api dari Israel.⁶⁵

Hingga 1969 para pemberontak telah mengembangkan kontak asing guna memperoleh senjata dan suplai. Israel, sebagai contoh, melatih rekrutan Anya Nya dan mengirim senjata melalui Ethiopia dan Uganda kepada pemberontak. Anya Nya juga membeli senjata tangan dari para pemberontak asal Kongo dan pedagang senjata internasional dengan kekayaan yang diperoleh dari selatan dan dari rakyat Sudan wilayah selatan dari komunitas buangan di Timur Tengah, Eropa Barat, dan Amerika Utara. Pemberontak juga menangkap senjata, perlengkapan, dan suplai dari pasukan pemerintah.⁶⁶

Pejabat Sudan mengatakan bahwa Israel telah menyediakan beberapa jenis senjata dan training kepada SPLA. Menteri Luar Negeri Sudan, Mustafa Othman Ismail menyatakan bantuan tersebut berupa suplai misil anti tank kepada para pemberontak melalui kedutaan Israel di Nairobi, Kenya. Bulan lalu, Ismail menyatakan keluhanya atas bantuan Israel kepada SPLA dalam suatu rapat dengan Sekretaris AS Colin Powell. Selanjutnya, menteri Sudan mengatakan ini merupakan kali pertama terdapat rapat seperti ini selama 15 tahun sebelumnya.⁶⁷

Keterlibatan Amerika Serikat, seperti halnya Israel, dalam memecah dan melemahkan Sudan tidak terlepas dari usaha menghegemoni sumberdaya minyak

⁶⁴Story of Israel's hand in Sudan division.

<http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/story-of-israels-hand-in-sudan-division> .Dinuduh pada 15 Februari 2012.

⁶⁵ Abdel Salam Sidahmed dan Alsir Sidahmed. *Sudan*. New York. Routledge Curzon. 2005. Hal.40.

⁶⁶*The South Sudan Problem*. <http://countrystudies.us/sudan/24.htm>. Diunduh pada 12 Februari 2012.

⁶⁷*Sudan rebels advance with new weapons from Israel* (World Tribune.com)

dan uranium di negara ini. Dalam perkembangan usahanya, Pemerintah Amerika Serikat dalam mengeksplorasi sumberdaya di Sudan juga dibantu berbagai organisasi NGO pendukung Zionis, misalnya *National Endowment for Democracy* (NED) atau *Evangelicals and Establishment Jews*, dengan tujuan memperoleh imej internasional untuk menegakkan perdamaian di Darfur yang sedang dilanda konflik.⁶⁸ Bahkan disebutkan Pemerintah Amerika Serikat bersemangat dalam mengadu domba sesama penduduk Sudan wilayah utara dan selatan agar saling bertikai, sementara, atas nama studi geologi, pihak Amerika Serikat melakukan pengeboran di wilayah Darfur yang memang memiliki sumber daya minyak yang menyaingi Arab dalam jumlah cadangan sumbernya.⁶⁹ Selain itu, Pemerintah Amerika juga ikut dalam memberikan suplai senjata kepada pemberontak. Amerika Serikat juga yang memelopori isu *genosida* pada 2004 melalui mantan Menlu AS Collin Powell yang menyatakan terjadi *genosida* di daerah Darfur⁷⁰ yang pada akhirnya menyeret Presiden Sudan Omar Hasan Ahmad Al Bashir sebagai salah satu tersangka oleh International Criminal Court (ICC). Hal tersebut dinilai sebagai tekanan besar bagi pemerintah Sudan, di sisi lain isu yang didengungkan Amerika Serikat yang mendorong penyelidikan ICC di lain pihak menekan ICC untuk menangkap para tersangka *genosida* termasuk Presiden Sudan, namun setelah pemerintah Sudan sedikit lunak dengan referendum Sudan

⁶⁸ Sara Flounders. *US Interest in Sudan* (The U.S. Role in Darfur, Sudan Oil reserves rivaling those of Saudi Arabia?). <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=2592>. Diunduh pada 15 Februari 2012.

⁶⁹ Ismail S.H. Ziada. *Oil in Sudan: Facts and Impact on Sudanese Domestic and International Relations*. www.sudantribune.com/IMG/pdf/Oil_industry_in_Sudan.pdf. Diunduh pada 15 Februari 2012. Hal 16.

⁷⁰ "Menteri Amerika serukan aksi untuk Darfur" lihat web

<http://www.kompas.com/kompasstory/2005/07/060721...> Diunduh 20 November

Selatan tekanan Amerika Serikat ikut melunak dan lebih cenderung fokus akan penyelesaian konflik Sudan dengan referendum.

B. Dukungan Dilakukannya Referendum Sudan.

Proses pengambilan keputusan referendum atas Sudan Selatan tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai kalangan yang mempunyai kepentingan atas dilakukannya Referendum Sudan. Dukungan tersebut tentunya bukan hanya berasal dari pihak Internal Sudan tapi juga dukungan yang besar dari berbagai negara yang juga mempunyai berbagai kepentingan atas dilakukannya Referendum Sudan. Dukungan tersebut antara lain :

1. Dukungan Internal.

Dukungan Internal dilakukannya Referendum tentunya mayoritas berasal dari rakyat di daerah Sudan Selatan. mayoritas penduduk Sudan Selatan yang memilih untuk berpisah dapat dianalisa oleh beberapa sebab. Salah satunya adalah konflik yang terus berlanjut antar kedua pihak, pasca perjanjian *Naivasha* di tahun 2005. Perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintahan pusat Khartoum dengan SPLA/M ternyata tidak menjangkau semua kelompok pemberontak yang ada. Konflik berlanjut di tahun 2006, antara kelompok pemberontak (yang kuantitasnya relative kecil dibandingkan SPLA/M). Salah satu kasus yang belum diselesaikan adalah nasib Abyei, kota yang terletak di pertengahan Sudan Utara dan Sudan Selatan, yang dianggap sebagai kota emas. Sebagai penghasil minyak

...di Sudan. Abyei menjadi target konflik bersenjata di tahun 2008

untuk memperebutkan daerah tersebut.⁷¹ Dukungan tersebut sebenarnya jauh dilakukan oleh rakyat Sudan Selatan. Dukungan tersebut dapat dilihat dari adanya partai liberty yang mayoritas pendukungnya adalah rakyat Sudan Selatan. Anggota Liberal Party yang terpilih dalam parlemen berusaha mengusulkan sebuah pemerintahan federal, yang memberikan Sudan Selatan administrative yang berbeda dengan Sudan Utara. Hal tersebut merupakan upaya Sudan Selatan dalam membentuk sebuah pemerintahan yang benar-benar tidak diskriminatif, dan berusaha memperbaiki keadaan warga negara yang berada di Sudan Selatan. Usulan tersebut mendapatkan tanggapan yang positif oleh anggota parlemen lainnya, termasuk mayoritas anggota dari NUP. Namun, ternyata tanggapan positif tersebut hanya sebagai janji yang tidak mungkin terealisasi. Janji dengan harapan akan mendapatkan suara dan dukungan dari rakyat Sudan Selatan.

Departemen pemerintahan serta posisi-posisi tinggi daerah di Sudan Selatan banyak dijabatani oleh warga Sudan Utara. Dari sini-lah banyak curigaan bahwa pemerintahan yang baru saja terbentuk, berusaha menyebarkan kekuasaannya, Sudan Selatan termasuk dalam cakupannya. Seiring dengan waktu, di level nasional posisi-posisi tinggi dalam militer, administrasi, serta kepolisian diduduki oleh warga negara Sudan Utara.

Mengatasi kemungkinan pemerintahan yang dikendalikan oleh Sudan Utara, maka mulai-lah banyak gerakan bermunculan, berusaha menentang sistem pemerintahan yang terjadi pada saat itu. Menuntut kesetaraan suara politik, dan

⁷¹ BBC news-Timeline: Sudan.

berharap agar aspirasi mereka akan pemerintahan federal dapat dijadikan pertimbangan.

2. Dukungan Eksternal

Dalam pengambilan kebijakan referendum di Sudan ada dua negara yang paling berkepentingan dan sangat mendukung terjadinya Referendum Sudan, kedua negara tersebut ialah Amerika Serikat dan Israel. Israel dengan tegas menyatakan dirinya sebagai ketua yang menyokong kebangkitan "Any-Nya". Israel mulai melancarkan provokasi kepada penduduk untuk melakukan pemberontakan. Tidak hanya itu, mereka juga mempersenjatai penduduk Sudan Selatan dengan berbagai persenjataan militer dan mendirikan akademi militer untuk para pemuda Sudan di Ethiopia, Uganda, dan Kenya. Bahkan tentara dan perwira Israel mendirikan karantina khusus untuk melatih pemuda-pemuda Sudan, dengan mengambil tempat di dalam negeri Sudan. Di dalam buku *The Israel Connection* tulisan Benjamin Beit-Hallahmi menyatakan bahwa Israel telah menyokong pemberontakan Sudan dibagian selatan semenjak tahun 1960-an. Dan semenjak itu, Israel memberikan kepada pergerakan pemberontakan "Any-Nya" berbagai senjata api maupun latihan militer. Berdasarkan maklumat Rolf-Steiner, seorang askar, yang bertarung dengan Any-Nya, Israel menjadi pelindung utama pihak pemberontak di bagian selatan.⁷² Hubungan baik antara kelompok pemberontak di Sudan Selatan yang ingin memisahkan diri dari Sudan dengan Israel, telah terbina lama sebelum John Garang, pimpinan kaum pemberontak

muncul ke pentas politik Sudan. Upaya penguasaan Sudan telah dirintis Zionis Israel sejak tahun 50-an. Mereka membina hubungan dengan penduduk Sudan Selatan dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar kepada penduduk di Sudan Selatan dan sebagian di Sudan Utara. Dengan dukungan yang dilakukan oleh Israel terhadap Sudan bagian Selatan, maka membuat Sudan bagian Selatan semakin optimis untuk mendapatkan negara yang terlepas dari Sudan. Dipihak lain Amerika Serikat sendiri dalam memecah dan melemahkan Sudan tidak terlepas dari usaha menghegemoni sumberdaya minyak dan uranium di negara ini. Dalam perkembangan usahanya, Pemerintah Amerika Serikat dalam mengeksplorasi sumberdaya di Sudan juga dibantu berbagai organisasi NGO pendukung Zionis, misalnya *National Endowment for Democracy* (NED) atau *Evangelicals and Establishment Jews*, dengan tujuan memperoleh imej internasional untuk menegakkan perdamaian di Darfur yang sedang dilanda konflik.⁷³ Bahkan disebutkan Pemerintah Amerika Serikat bersemangat dalam mengadu domba sesama penduduk Sudan wilayah utara dan selatan agar saling bertikai, sementara, atas nama studi geologi, pihak Amerika Serikat melakukan pengeboran di wilayah Darfur yang memang memiliki sumberdaya minyak yang menyaingi Arab dalam jumlah cadangan sumbernya.⁷⁴ Amerika Serikat juga yang memelopori isu *genosida* pada 2004 melalui mantan Menlu AS Collin Powell

⁷³ Sara Flounders. *US Interest in Sudan* (The U.S. Role in Darfur, Sudan Oil reserves rivaling those of Saudi Arabia?). <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=2592>. Diunduh pada 15 Februari 2012.

⁷⁴ Ismail S.H. Ziada. *Oil in Sudan: Facts and Impact on Sudanese Domestic and International Relations*. www.sudantribune.com/IMG/pdf/Oil_industry_in_Sudan.pdf. Diunduh pada 15 Februari 2012. Hal 16.

yang menyatakan terjadi *genosida* di daerah Darfur⁷⁵ yang pada akhirnya menyeret Presiden Sudan Omar Hasan Ahmad Al Bashir sebagai salah satu tersangka oleh International Criminal Court (ICC). Hal tersebut dinilai sebagai tekanan besar bagi pemerintah Sudan, di sisi lain isu yang didengungkan Amerika Serikat yang mendorong penyelidikan ICC di lain pihak menekan ICC untuk menangkap para tersangka *genosida* termasuk Presiden Sudan, namun setelah pemerintah Sudan sedikit lunak dengan referendum Sudan Selatan tekanan Amerika Serikat ikut melunak dan lebih cenderung fokus akan penyelesaian konflik Sudan dengan referendum.

C. REFERENDUM SUDAN SELATAN

Dengan banyaknya tekanan baik didalam maupun dari luar Sudan mengakibatkan Sudan Utara akhirnya mengambil keputusan untuk setuju melakukan Referendum atas Sudan selatan melalui Perjanjian Naivasha. Dapat dipaparkan bahwa konflik yang berlangsung sejak 1955 sangat mengganggu kinerja pemerintahan Sudan dan mengorbankan jutaan nyawa manusia. Hal ini diperkuat dengan kekuatan asing yang begitu besar menekan keberadaan negara Sudan. Pilihan untuk melakukan referendum adalah pilihan paling tepat dan aman yang bisa dilakukan oleh Sudan utara meskipun pemasukan terbesar Sudan berasal dari sektor minyak yang berada di Sudan selatan. Hal lain yang menguatkan adalah berasal dari hasil referendum Sudan Selatan. Hasil dari referendum yang

⁷⁵“Menteri Amerika serukan aksi untuk Darfur” lihat web

Hasil referendum yang menjadwalkan kemerdekaan, membawa kesenangan bagi rakyat Sudan selatan pada tanggal 9 Juli 2011. Sebagai negara ke-193, Republik Sudan Selatan akan menghadapi berbagai kesulitan sebagai negara baru, termasuk konflik yang sampai saat itu masih berlanjut. Konflik bersenjata antara Sudan Selatan dan Utara. Walaupun akan menghadapi permasalahan yang rumit, warga Sudan Selatan tetap melakukan selebrasi di jalanan, merayakan hari kebebasan mereka. Warga Sudan Utara di sisi lain membawa reaksi yang berbeda. Kegagalan untuk membentuk sebuah negara yang multi-etnis, berkurangnya pemasukan negara dari industry oli yang 75% terletak di Sudan Selatan,⁷⁹ serta kehilangan wilayah negara yang besar mewarnai pemikiran rakyat Sudan Utara saat deklarasi kemerdekaan dilakukan.

⁷⁹ World's 193rd State is born with Sudan's partition.

<http://www.dawn.com/2011/07/09/worlds-193rd-state-is-born-with-sudans-partition.html>. Diakses